

# POLA KEBERAGAMAAN MASYARAKAT MARGINAL

*Ahmad Muttaqin*

Institut Agama Islam Negeri Purwokerto

**Abstract:** This study examines the issue of the sociology of religion at the religious practices of local communities. Kampung Laut selected as a test site for two (2) major consideration. First, the practice of religion in the fom of ritual in Kampung Laut is different from the mainstream that is considered wrong and become targets for streamlining activities.

Second, the typical characteristics of Kampung Laut people in the vortex of conflict government agencies on claims of ownership of natural resources. Correctional Institution (LP) as part of Kemenkumham, Cilacap regency government and PT. Perhutani conflict over land ownership arising from sedimentation along Segara Anak. Conflicts that exist tend to be maintained to a certain political interests. Even more, these institutions construct public issue by positioning Kampung Laut as threatening communities via label illegal loggers and destroyers of ecosystems.

Bad image fomed through a process of marginalization is then formed the distinctive character of the community as a community of Kampung Laut resistant and latent.

The method used in this research is descriptive qualitative sociological approach. Through sociological analysis, practice different religious rituals that seem to have rationalization based on the theory of action Weber in the category of value-oriented rationality. Different actions with mainstream thought to have more benefits in the context of the struggle for existence of identity in the practice of marginalization carried out by institutions conflictual. Religiorn becomes the entry point of this issue given its massive, communal, and mobilized by the transcendental values.

**Keywords:** Religion, Conflict, Ritual, Mainstream.

**Abstrak:** Penelitian ini termasuk dalam bidang sosiologi agama dengan menempatkan isu praktik agama pada komunitas lokal. Kampung Laut dipilih sebagai lokasi penelitian karena 2 (dua) pertimbangan utama, *pertama*, praktik agama dalam bentuk ritual di Kampung Laut berbeda dengan *mainstream*. Implikasinya adalah labelisasi dan justifikasi bahwa keagamaan masyarakat Kampung Laut dianggap tidak menjadi bagian atau setidaknya menjadi sempalan dari agama *mainstream* sebagai induknya. Karena pelabelan ini, praktik-praktik ritual keagamaan masyarakat

Kampung Laut dianggap salah dan menjadi sasaran bagi kegiatan-kegiatan pelurusan.

*Kedua*, karakteristik khas masyarakat Kampung Laut yang berada dalam pusaran konflik lembaga-lembaga pemerintah atas klaim kepemilikan sumberdaya alam. Lembaga Pemasyarakatan (LP) sebagai bagian kerja Kemenkum HAM, Pemerintah Kabupaten Cilacap, dan PT. Perhutani terlibat konflik kepemilikan atas tanah timbul akibat sedimentasi di sepanjang Segara Anakan. Masing-masing mengklaim sebagai pihak yang paling berwenang mengelola tanah timbul tersebut. Namun demikian, konflik yang ada cenderung dipelihara untuk kepentingan-kepentingan politik tertentu. Untuk mendramatisasi kondisi konflik, lembaga-lembaga tersebut mengkonstruksi isu dengan memosisikan masyarakat Kampung Laut sebagai komunitas pengancam melalui label perambah liar dan perusak ekosistem.

Citra buruk yang dibentuk melalui proses marginalisasi ini kemudian membentuk karakter khas masyarakat Kampung Laut sebagai komunitas yang resisten dan laten. Tindakan-tindakan yang diarahkan kepada pihak lain di luar komunitasnya diarahkan untuk memperjuangkan eksistensi identitasnya melalui tindakan-tindakan yang terkesan berbeda bahkan menyimpang dengan pandangan masyarakat umum. Termasuk dalam hal keberagaman.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan sosiologi. Pendekatan sosiologis tidak berpretensi terlibat dalam sikap membenarkan atau menyalahkan, tetapi mencoba menarasikan fakta sesuai dengan kecenderungannya. Pola keagamaan yang terkesan berbeda dinarasikan sesuai dengan kecenderungan masyarakat yang didasarkan atas pandangan-pandangan keagamaannya. Dengan pendekatan ini akan ditemukan argumentasi sosiologis tentang sikap-sikap yang diambil dalam tindakan sosial suatu komunitas.

Melalui analisis sosiologis, praktik ritual keagamaan yang terkesan berbeda memiliki rasionalisasi yang berdasar teori tindakan Weber dalam kategori rasionalitas berorientasi nilai. Tindakan yang berbeda dengan *mainstream* dianggap memiliki manfaat lebih dalam konteks perjuangan eksistensi identitasnya dalam praktik marginalisasi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga konfliktual. Tindakan lokal ini memberi penggambaran kepada masyarakat umum bahwa masyarakat Kampung Laut mengalami perlakuan-perlakuan tidak adil atas sumberdaya yang diperebutkan. Agama menjadi titik masuk isu ini mengingat sifatnya yang massif, komunal, dan termobilisasi oleh nilai-nilai transendental.

***Kata Kunci:*** Agama, Konflik, Ritual, Mainstream.

## A. PENDAHULUAN

Secara sosiologis, agama muncul pada saat ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai kekuatan yang diandalkan untuk memenuhi kebutuhan hidup mengalami

degradasi atau kehilangan kemampuannya. Manusia hidup dihadapkan pada kondisi alam dan lingkungan sosial yang harus dirubah agar memberi kontribusi atau minimalnya tidak memberi ancaman bagi kelangsungan kehidupan. Proses merubah alam dan lingkungan sosial ini dilakukan dengan pendekatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bersifat empiris dan teknis.<sup>1</sup>

Pada saat manusia mengalami ketidakberdayaan akibat ketidakmampuan ilmu pengetahuan dan teknologi muncul keyakinan bahwa selain yang empiris terdapat sesuatu yang non empiris. Sesuatu yang non empiris ini diyakini memiliki kontribusi dan memberikan pengaruh bagi kehidupan manusia di bumi. Dalam konteks inilah muncul kebutuhan baru manusia untuk mengetahui dan berinteraksi dengan kehidupan non empiris untuk memberikan jaminan agar kehidupan tetap berlangsung dan sejahtera. Proses mengetahui dan berkomunikasi dengan sesuatu yang non empiris ini yang kemudian disebut dengan agama.<sup>2</sup>

Dengan pola di atas, agama merupakan bentuk universal yang dihadapi manusia di belahan bumi manapun. Artinya bahwa agama muncul dan menjadi kebutuhan baru manusia yang gejalanya bersifat dinamis dan terus berubah. Semakin suatu masyarakat dinamis dan berkembang maka kebutuhan akan sesuatu yang bersifat transendental dalam rangka mengelola hal-hal yang non empiris semakin tinggi. Persoalan yang kemudian muncul adalah formulasi dan konstruksi keyakinan keagamaan yang berbeda-beda. Perbedaan ini terjadi karena proses pewarisan keyakinan secara turun-temurun. Hal lain yang berpengaruh terhadap konstruksi yang berbeda tentang agama adalah pandangan sosial suatu komunitas atas lingkungan alam dan sosial yang mengitarinya.

## **B. KONSTRUKSI AGAMA**

Agama muncul dalam ruang sosial yang dinamis dan memiliki kelenturan atau fluiditas pada saat berinteraksi dengan unsur-unsur lain sebagai salah satu bagian dari proses sosial yang berlangsung. Bahkan pada beberapa kasus, proses fluiditas berdampak pada pemaknaan baru suatu entitas yang berinteraksi. Agama sebagai entitas yang memiliki makna khusus bisa bermakna baru yang berbeda dengan sebelumnya ketika berinteraksi dengan kebudayaan lain.<sup>3</sup> Makna baru ini kemudian dijadikan sebagai konsensus dan referensi baru suatu komunitas pembentuknya dan mendorong

perilaku-perilaku yang berbeda dengan mainstream agama sebelum mengalami fluiditas.

Usia agama yang telah berabad-abad seiring sejarah manusia di bumi menjadikannya mengalami evolusi dalam banyak tahap.<sup>4</sup> Ini artinya bahwa agama sebagai konstruksi tidak bersifat ajeg tetapi mengalami dinamika seiring dengan perubahan yang terjadi di masyarakat. Persoalannya kemudian adalah agama terutama yang bersumber pada ajaran-ajaran samawi (Islam, Nasrani, dan Yahudi) diyakini memiliki kebenaran tunggal. Keyakinan kebenaran tunggal ini kemudian mendorong sekelompok komunitas mengkonstruksi agama sebagai mainstream. Melalui proses-proses kajian metodologis, beberapa komunitas mengklaim pemahaman tentang agama yang diyakini sebagai yang benar sehingga harus menjadi mainstream bagi pemahaman kelompok lain. Dalam situasi inilah agama berubah menjadi area kontes dan perebutan klaim-klaim kebenaran.

Secara stratifikatif, pandangan tentang agama antarkelas-kelas sosial berbeda. Pandangan ini sejalan dengan kepentingan sosial (*social interest*) masing-masing kelas yang berbeda. Kelas sosial yang relatif berposisi menengah ke atas akan memiliki pandangan bahwa agama sebagai entitas yang dimiliki oleh setiap kelompok sosial merupakan aset ekonomis yang bisa dimanfaatkan dalam rangka memperoleh keuntungan. Sebaliknya bagi kelas sosial yang berposisi menengah ke bawah, agama dianggap sebagai representasi kekuatan yang mampu mengakomodasi kelemahan-kelemahan yang dimilikinya. Melalui agama, kelompok sosial ini menutupi kelemahan-kelemahan tersebut melalui tindakan-tindakan peribadatan dan ritual keagamaan lainnya.<sup>5</sup>

Persoalan kemudian adalah stratifikasi sosial terbentuk secara sosial. Artinya bahwa pelapisan sosial yang ada terjadi melalui proses-proses sosial yang mengarah pada praktik-praktik kekuasaan. Relasi kuasa yang timpang kemudian melahirkan kelompok-kelompok sosial berkuasa-dominan dan kelompok-kelompok sosial marginal-tidak berdaya. Stratifikasi sosial mewakili praktik kepentingan (*interest*) yang berbeda dari masing-masing anggotanya. Kelompok dominan akan menempati posisi lapisan sosial yang paling atas, sedang kelompok sosial sub ordinat akan diposisikan pada lapisan yang rendah.<sup>6</sup>

Sementara itu, kelompok marginal secara evolutif mengembangkan cara berpikir sendiri sebagai bagian dari upaya membangun karakter dan identitas diri. Cara berpikir ini dikembangkan berdasar realitas marginalisasi yang diterima sehingga cenderung reaktif. Pada tahap lanjut, cara berpikir ini akan menjadi panduan (guidance) bagi komunitas dan anggotanya dalam bertindak dan berperilaku yang umumnya berbeda dengan mainstream. Agama dalam masyarakat Indonesia dijadikan sebagai panduan moral dalam bertindak dan berperilaku yang bersifat universal sehingga muncul bentuk-bentuk tertentu sebagai mainstream. Bagi kelompok marginal, agama dalam bentuk mainstream adalah bentuk dominasi tertentu sehingga mereka mengembangkan cara berpikir sendiri tentang agama yang dijadikan sebagai panduan bertindak dan berperilaku anggotanya.

### **C. KOMUNITAS KAMPUNG LAUT**

Kampung Laut secara geografis berada di wilayah Kabupaten Cilacap yang berdampingan langsung dengan Pulau Nusakambangan. Kampung Laut merupakan kecamatan hasil pemekaran dari Kawunganten memiliki 4 (empat) desa, yaitu Ujung Gagak, Klaces, Ujung Alang, dan Panikel. Masing-masing desa terpisah oleh perairan sehingga transportasi satu desa dengan desa lainnya menggunakan kapal atau perahu.

Persoalan mendasar yang dialami masyarakat Kampung Laut saat ini adalah pendangkalan Segara Anakan akibat laju sedimentasi dari beberapa sungai terutama Citanduy dan Cimeneng. Sementara itu, Segara Anakan merupakan area tangkap ikan masyarakat Kampung Laut. Dengan semakin dangkalnya Segara Anakan maka mata pencaharian masyarakat sebagai nelayan tangkap tradisional terancam.

Secara sosial, masyarakat Kampung Laut hidup dalam pusaran konflik yang melibatkan 3 (tiga) institusi besar negara, yaitu Kehakiman sebagai lembaga yang memiliki otoritas Pulau Nusakambangan, Perhutani sebagai pengelola hutan sekitar Nusakambangan, dan Pemerintah Daerah sebagai penguasa wilayah.<sup>7</sup> Konflik yang melibatkan lembaga-lembaga tersebut sudah berlangsung lama dan hingga kini belum ada penyelesaian sehingga masyarakat menjadi pihak yang paling banyak menanggung dampaknya.

Sebagai entitas universal, keberadaan agama secara substantif tidak bisa ditolak oleh masyarakat Kampung Laut. Namun secara sosial politik, konstruksi agama sebagai

mainstream ditolak. Masyarakat memiliki konstruksi sendiri tentang agama yang didasarkan atas kondisi lingkungan alam dan sosial yang secara umum memposisikan mereka sebagai kelompok marginal. Dalam konteks inilah penelitian ini dirancang untuk menemukan pandangan-pandangan keagamaan masyarakat Kampung Laut. Pandangan keagamaan ini yang berfungsi sebagai panduan masyarakat bertindak dan berperilaku secara sosial.

### **Teori Tindakan Sosial**

Tindakan sosial bagi Weber adalah suatu tindakan individu sepanjang tindakan itu mempunyai makna atau arti subjektif bagi dirinya dan diarahkan kepada tindakan orang lain.<sup>8</sup> Suatu tindakan individu yang diarahkan kepada benda mati tidak masuk dalam kategori tindakan sosial. Tindakan sosial merupakan tindakan yang nyata-nyata diarahkan kepada orang lain. Tindakan sosial dapat berupa tindakan yang bersifat membatin atau bersifat subjektif yang mungkin terjadi karena pengaruh positif dari situasi tertentu atau merupakan tindakan pengulangan dengan sengaja sebagai akibat dari pengaruh situasi yang serupa atau berupa persetujuan secara pasif dalam situasi tertentu.<sup>9</sup>

Lima ciri pokok yang menurut Weber<sup>10</sup> termasuk sebagai tindakan sosial, yaitu: (1) jika tindakan manusia itu menurut aktornya mengandung makna subjektif dan hal ini bisa meliputi berbagai tindakan nyata, (2) tindakan nyata itu bisa bersifat membatin sepenuhnya, (3) tindakan itu bisa berasal dari akibat pengaruh positif atas suatu situasi, tindakan yang sengaja diulang, atau tindakan dalam bentuk persetujuan secara diam-diam dari pihak mana pun, (4) tindakan itu diarahkan kepada seseorang atau kepada beberapa individu, dan (5) tindakan itu memperhatikan tindakan orang lain dan terarah kepada orang lain itu. Selain kelima ciri pokok tersebut, menurut Weber tindakan sosial dapat pula dibedakan dari sudut waktu sehingga ada tindakan yang diarahkan kepada waktu sekarang, waktu lalu, atau waktu yang akan datang. Sasaran suatu tindakan sosial bisa individu tetapi juga bisa kelompok atau sekumpulan orang.

Teori tindakan sosial terbagi dalam empat tipe, yaitu tindakan rasional instrumental, tindakan rasional berorientasi nilai, tindakan tradisional, dan tindakan afektif. Tindakan rasional instrumental merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan memperhitungkan kesesuaian antara cara yang digunakan dengan

yang dipikirkan. Pelaku berpikir bahwa tindakan yang dilakukan termasuk dalam kriteria baik dan benar menurut ukuran dan penilaian masyarakat di sekitarnya. Contohnya, seseorang ingin membeli kendaraan bermotor. Ia harus bekerja keras untuk mengumpulkan uang. Uang tersebut disisihkan untuk keperluan pribadi dan tabungan membeli kendaraan. Jika tabungannya sudah terkumpul atau sudah mencukupi harga sebuah kendaraan bermotor, maka ia akan membeli kendaraan tersebut.

Tindakan tradisional merupakan tindakan yang tidak rasional karena seseorang melakukan tindakan hanya karena kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat tanpa menyadari alasannya atau membuat perencanaan terlebih dahulu mengenai tujuan-tujuan yang akan dicapai oleh sang aktor. Jadi, tindakan tradisional berdasarkan suatu nilai yang hanya mengikuti pada tradisi yang dilakukan dan hanya berdasarkan oleh para pendahulunya saja, tidak diketahui apa maksud dan tujuan dari kegiatan tersebut. Tindakan ini bahkan tidak rasional untuk dilaksanakan. Contohnya adalah upacara adat Jawa yang sudah ada semenjak zaman dahulu. Kadang tujuannya bahkan tidak diketahui oleh yang melaksanakan.

Tindakan rasional berorientasi nilai merupakan tindakan yang bersifat rasional dan memperhitungkan manfaatnya, tetapi tujuan yang hendak dicapai dan cara yang digunakan tidak terlalu dipentingkan. Jadi, rasional berorientasikan nilai adalah tindakan sosial yang memperhitungkan manfaatnya, tapi tujuan yang ingin dicapai tidak terlalu dipertimbangkan. Tindakan tersebut dinilai baik dan benar oleh masyarakat sekitarnya. Contohnya yaitu seseorang yang melakukan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Contoh lainnya yaitu seorang pemuda memberikan tempat duduknya kepada seorang nenek karena ia memiliki keyakinan bahwa anak muda harus hormat kepada orang tua. Atau, seorang berpuasa sekian hari untuk mendapatkan berkah sesuai dengan kepercayaannya.

Tindakan afektif merupakan tindakan yang biasanya dikuasai oleh perasaan atau emosi tanpa memperhitungkan akal budi. Seringkali tindakan ini dilakukan tanpa perencanaan matang dan tanpa kesadaran penuh dan dapat dikatakan tindakan yang dilakukan merupakan reaksi spontan atas suatu peristiwa. Tindakan ini juga bersifat irrasional. Contohnya adalah seseorang bekerja lebih giat untuk mendapatkan pujian dari atasannya. Tindakan ini didasarkan pada perasaan yang ingin mendapat perhatian lebih. Contoh lainnya, orang tua akan melakukan apa saja untuk melindungi anaknya.

Bahkan melakukan hal yang dapat membahayakan dirinya sendiri untuk menyelamatkan anaknya. Tindakan afektif terhadap si anak, membuat orangtua tersebut melakukan hal yang orang lain tidak bersedia lakukan.

Tindakan sosial menekankan pada orientasi subjektif yang mengendalikan pilihan-pilihan individu. Pilihan-pilihan ini secara normatif diatur atau dikendalikan oleh nilai atau standar normatif bersama. Hal ini berlaku untuk tujuan-tujuan yang ditentukan individu serta alat-alat yang digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan itu juga dalam memenuhi kebutuhan fisik yang mendasar ada pengaturan normatifnya.<sup>11</sup>

#### **D. KONDISI SOSIOLOGIS MASYARAKAT MARGINAL**

Kelompok marginal atau pinggiran memiliki konstruksi sosiologis yang berbeda dengan kelompok sosial umumnya. Hal ini karena unsur pembentuk sosiologis kelompok marginal umumnya berasal dari luar dirinya yang prosesnya berlangsung secara politis. Artinya adalah bahwa keberadaan kelompok marginal bukan merupakan sesuatu yang bersifat alamiah, tetapi merupakan produk sosial yang prosesnya berlangsung secara politis dan didasarkan atas relasi kuasa yang tidak berimbang.<sup>12</sup>

Dalam konteks masyarakat marginal, perilaku dan tindakan hanya bisa dimaknai secara menyeluruh dan total dari kesatuan aktivitas mental dan empiris. Pola pikir masyarakat marginal dipengaruhi oleh situasi-situasi psiko-sosial yang memosisikannya berperilaku di luar mainstream. Perilaku ini yang sering diistilahkan dengan tidak beradab dan tidak beretika. Labelisasi ini berlangsung terus-menerus sehingga menjadi salah satu pembentuk karakter yang cukup berpengaruh bagi kelompok marginal.

Proses marginalisasi ini kemudian berpengaruh signifikan bagi terciptanya kondisi-kondisi sosial kelompok yang diposisikan terpinggir. Pertama, konflikual.<sup>13</sup> Marginalisasi sebagai praktik politik mengarah kepada pembentukan sosial yang berbeda dengan gambaran aslinya. Tujuan marginalisasi adalah memberi penggambaran yang tidak sesuai yang umumnya berkonotasi buruk atas kelompok masyarakat yang menjadi target sasaran. Proses ini kemudian melahirkan kondisi-kondisi khas masyarakat marginal yang berasal dari kontroversi internal. Dalam tingkat lanjut, kontroversi ini kemudian memunculkan sikap-sikap curiga dan ketidakpercayaan yang dimiliki oleh masing-masing individu anggota masyarakat. Sikap penuh curiga dan



under estimate pada tahap lanjut menjadi embrio bagi hubungan-hubungan sosial yang terpola secara konfliktual.

#### **E. MARGINALISASI MASYARAKAT KAMPUNG LAUT**

Keberadaan masyarakat Kampung Laut dimulai jauh sebelum Indonesia dideklarasikan. Tepatnya sekitar abad ke-12 pemerintahan Kerajaan Mataram yang mengutus beberapa prajuritnya untuk mengamankan wilayahnya dari para bajak laut berkebangsaan Portugis.<sup>14</sup> Sejak saat itu, kehidupan masyarakat Kampung Laut dimulai dan mata pencahariaan mereka adalah nelayan tradisional dengan area tangkap utamanya di Segara Anakan.

Persoalan kemudian mulai muncul saat pulau Nusakambangan ditetapkan sebagai “Pulau Penjara” oleh pemerintah Hindia Belanda. Pulau yang sebelumnya tidak berpenghuni kemudian kedatangan warga baru baik para tahanan maupun penjaga atau sipir dan keluarganya. Warga yang tadinya menempati tanah-tanah di Nusakambangan kemudian tergeser ke wilayah-wilayah pinggiran Nusakambangan yang saat ini dikenal dengan Kampung Laut. Konflik semakin meningkat pada saat pemerintah Indonesia menetapkan bahwa Nusakambangan merupakan otoritas dari kehakiman yang diperuntukkan sebagai penjara melalui ordonasi staatblads Pemerintah Hindia Belanda Nomor 25 tanggal 10 Agustus 1912. Staatblads tersebut menetaapkan Nusakambangan sebagai Pulau Penjara yang pengelolaannya diserahkan kepada Departemen Van Justitie (Departemen Kehakiman) dan saat ini menjadi Menkumham.

Konflik pertama yang muncul adalah pengelola Nusakambangan merasa berhak atas segala yang ada di atas pulau termasuk lahan-lahan pertanian yang digarap oleh warga Kampung Laut sebagai mata pencahariaan. Sikap represif ala militer menjadi intimidasi tersendiri bagi warga untuk meninggalkan lahan pertanian di Pulau Nusakambangan. Konflik awal ini tidak berhenti setelah terjadi pengusiran dari Nusakambangan, tetapi justru semakin mengalami peningkatan karena pertanian saat itu merupakan satu-satunya pilihan yang mungkin diambil selain menjadi nelayan tradisional.

Kedua, konflik semakin meningkat saat terjadi perubahan lingkungan fisik berupa pendangkalan Segara Anakan akibat sedimentasi sungai-sungai terutama dari Citanduy dan Cimeneng. Sedimentasi ini berdampak pada meningkatnya tumpukan lumpur di

sepanjang aliran sungai dan laguna yang beraakibat pada menyempitnya Segara Anakan. Perubahan fisik ini memaksa warga Kampung Laut berpikir alternatif untuk mencari profesi baru di luar nelayan tradisional. Tumpukan lumpur yang disebut dengan tanah timbul kemudian dimanfaatkan oleh warga sebagai lahan pertanian dan praktik perikanan. Warga mulai beralih profesi dari nelayan tangkap tradisional menjadi petani dan nelayan budidaya. Persoalan kemudian adalah tanah timbul diklaim juga oleh kehakiman sebagai pemegang otoritas pulau Nusakambangan. Argumentasinya adalah bahwa tanah timbul tersebut menempel pada Pulau Nusakambangan sehingga hak penguasaannya berada pada kehakiman. Keberadaan warga kembali terancam oleh otoritas kehakiman.

Ketiga, keberadaan tanah timbul menjadi pusat konflik yang melibatkan institusi besar negara. Selain kehakiman dengan argumentasi bahwa tanah timbul sebagai bagian dari Nusakambangan, muncul dalam pusran konflik adalah pemerintah kabupaten Cilacap dan Perhutani. Masing-masing memberikan argumentasi-argumentasi yang diperkuat dengan landasan regulasi. Pemerintah Kabupaten menggunakan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), sementara Perhutani menggunakan PP tentang pengelolaan lahan kritis. Konflik antar institusi negara ini memosisikan warga Kampung Laut sebagai pihak yang dianggap sebagai pelanggar hukum, perambah liar, dan perusak lahan. Ketiganya menempatkan warga sebagai pihak yang salah.

Konflik tiga institusi negara ini sudah berlangsung lama dan hingga kini belum ada titik temu dalam rangka pemecahannya. Kecenderungannya justru dipelihara karena ada kepentingan-kepentingan tertentu atas keberlangsungan konflik. Artinya adalah bahwa konflik di Kampung Laut menjadi komoditas oleh masing-masing institusi tersebut untuk memperoleh keuntungan tertentu. Indikasinya adalah keberadaan proyek-proyek atas nama konservasi, pembinaan, penyelamatan lingkungan, dan berbagai jenis proyek pengentasan kemiskinan.

Keberadaan warga Kampung Laut dalam perspektif konflik di atas menjadi komoditas yang diperebutkan. Situasi sosial warga akan terlihat lebih menarik apabila dikonstruksi dalam bentuk atau profil yang deviatif atau diferentiatif dengan masyarakat umum lainnya. Dengan profil warga yang patologis inilah argumentasi-argumentasi tentang pemberdayaan, penyelamatan lingkungan, konservasi, dan penanggulangan

kemiskinan diproduksi dan direproduksi. Warga menjadi komoditas yang ditransaksikan melalui proyek-proyek pembangunan.

Proses marginalisasi terhadap warga Kampung Laut terselenggara secara sistematis dan memanfaatkan isu konflik sumberdaya Segara Anakan dan hutan mangrove. Konflik ini sengaja dipelihara dan tidak ada political will dari elite-elite lembaga untuk menyelesaikannya secara tuntas sehingga memberikan kejelasan posisi warga Kampung Laut. Sikap memelihara konflik ini terjadi karena memberikan keuntungan lebih besar bagi masing-masing lembaga melalui proyek-proyek atas nama perambah liar dan kemiskinan warga.

Melalui praktik marginalisasi ini, isu tentang Kampung Laut terkesan kritis, dramatis, dan membutuhkan kecepatan waktu untuk segera ditangani. Konstruksi isu ini kemudian dipertegas dengan pembentukan opini-opini tentang masyarakat Kampung Laut sebagai komunitas yang liar, terbelakang, dan miskin. Dengan demikian maka marginalisasi Kampung Laut dilakukan secara politis untuk memberikan gambaran-gambaran yang kritis dan memerlukan penanganan ekstra. Lembaga-lembaga yang terlibat konflik semu mengidentifikasi diri sebagai lembaga yang paling sah untuk diberi kewenangan untuk mengatasi keliaran dan kemiskinan warga Kampung Laut. Sementara itu, warga Kampung Laut sebagai objek marginalisasi diposisikan tidak lebih sebagai partisipan atas proyek-proyek pembangunan yang berlangsung.

## **F. KESIMPULAN**

Perilaku keberagaman tereksresi dari pandangan keagamaan yang konstruksinya dipengaruhi oleh kondisi lingkungan fisik dan situasi sosiologis. Bagi masyarakat Kampung Laut, kondisi fisik dan situasi sosiologis yang berbeda dengan idealitas mereka melahirkan karakter resisten dan laten. Karakter ini berpengaruh terhadap pandangan-pandangan keagamaan yang berproyeksi sebagai alat untuk melakukan perlawanan dan memunculkan fungsi-fungsi latensi dari agama.

Bagi masyarakat Kampung Laut, agama dipahami sebagai instrumen untuk keluar dari persoalan-persoalan faktual yang pertama keterancaman lingkungan fisik yang memberi potensi kehilangan profesi dan mata pencahariaan. Persoalan faktual kedua marginalisasi komunitas oleh lembaga-lembaga pemerintah yang terlibat konflik

kepemilikan atas tanah timbul di sepanjang Segara Anakan. Agama diyakini memiliki kemampuan solutif atas persoalan-persoalan faktual melalui metode transendensi.

Keyakinan ini kemudian mendorong masyarakat memproduksi upacara-upacara ritual yang bersifat massal yang diarahkan untuk membantu masyarakat menemukan solusi atas persoalan-persoalan faktual yang dihadapi. Namun karena karakter resisten dan laten, praktik ritual keagamaan ini dikonstruksi berbeda dengan mainstream. Konteks ini ditujukan untuk memberi penggambaran kepada pihak-pihak di luar komunitas bahwa masyarakat Kampung Laut memiliki eksistensi yang mandiri dan berbeda dengan opini masyarakat pada umumnya. Ritual keagamaan yang bersifat massal digunakan sebagai instrumen penyampai informasi kepada publik terkait eksistensi yang diperjuangkan.

Dengan demikian, praktik ritual keagamaan yang terkesan menyimpang sesungguhnya menjadi bagian dari perjuangan eksistensial masyarakat Kampung Laut yang mengalami marginalisasi secara politis oleh lembaga-lembaga yang terlibat konflik kepemilikan tanah timbul. Kesan menyimpang dikreasikan untuk tujuan memperoleh manfaat tertentu. Manfaat ini dianggap lebih besar ketimbang apabila masyarakat melakukan praktik ritual yang sama dengan keagamaan *mainstream*.

## ENDNOTES

---

<sup>1</sup> Ketidakmampuan manusia mengandalkan pengetahuan dan teknologi terjadi akibat beberapa kondisi, yaitu keyakinan akan jiwa immateri, fenomena yang tidak bisa dicerna oleh akal sehat, kejadian yang sangat besar dan merusak, realitas krisis-krisis dalam hidup, sentimen kemasyarakatan, dan keyakinan akan adanya kekuatan ilahi atau wahyu. Atas kondisi-kondisi ini, masyarakat awal sejarah mencari institusi baru yang dianggap memiliki legitimasi untuk memberikan kontribusi bagi kehidupan manusia.

<sup>2</sup> Radcliffe Brown menjelaskan bahwa agama di manapun merupakan ekspresi suatu bentuk ketergantungan pada kekuatan di luar manusia, yang dapat dikatakan sebagai kekuatan spiritual dan moral. Ekspresi penting dari rasa ketergantungan ini adalah peribadatan.

<sup>3</sup> Fluiditas merupakan pelenturan suatu entitas budaya pada saat ia masuk pada wilayah kebudayaan lain. Pelenturan ini membuat simbol budaya awal memetamorfosis dalam makna yang baru sekaligus membuat simbol baru. Hal ini karena manusia bukanlah mekanis yang bisa mempraktikkan apa yang diterima sebagai apa adanya dan persis. Manusia akan mendesain ulang apa yang diterimanya secara sadar ataupun tanpa sadar. Dadang Kahmad, *Sosiologi Agama*, (Bandung: Rosdakarya, 2000), hlm. 76-77.

<sup>4</sup> Audifax, *Semiotika Tuhan, Tafsir atas Pembacaan Manusia terhadap Tuhan*, (Yogyakarta: Pinus Book Publisher, 2007), hlm. 66-67.

<sup>5</sup> Daniel L. Pals, *Seven Theories of Religion*, (New York: Oxford University Press, 1996), hlm. 199-202.

<sup>6</sup> Stratifikasi sosial di Indonesia terbentuk dengan menggunakan 4 (empat) hal dasar, yaitu ekonomi, pengetahuan, kekuasaan, dan kehormatan. Umumnya seseorang memiliki unsur lebih dari satu dari dasar pembentuk stratifikasi tersebut. Contohnya orang yang kaya umumnya juga memiliki pengetahuan yang tinggi. Semakin tinggi kepemilikan seseorang atas salah satu atau beberapa unsur

pembentuk stratifikasi maka semakin tinggi pula kelas sosial di masyarakat. Sebaliknya semakin rendah kepemilikan atas unsur pembentuk stratifikasi maka semakin rendah posisi sosialnya di masyarakat. Thomas F. O'Dea, *Sosiologi Agama, Suatu Pengenalan Awal*, (Jakarta: Rajawali Press, 1996), hlm. 109-111.

<sup>7</sup> Pendangkalan Segara Anakan membuat masyarakat Kampung Laut mencari alternatif mata pencaharian baru sebagai antisipasi hilangnya area tangkap. Salah satu bentuk alternatif itu adalah mengelola tanah timbul hasil sedimentasi sungai Citanduy dan Cimeneng. Persoalannya adalah tanah timbul tersebut disengketakan oleh tiga lembaga negara. Nusakambangan mengklaim tanah timbul menjadi bagian tak terpisahkan dari Nusakambangan, sementara Perhutani mengklaim tanah timbul sebagai area tanam perhutani, begitu halnya Pemda yang mengklaim sebagai wilayah otoritasnya. Masyarakat mengelola tanah timbul semata-mata subsistensi ekonomi namun kemudian dilabeli sebagai perambah liar, penyerobot tanah, dan perusak ekosistem. Ahmad Muttaqin, *Alih Profesi Masyarakat Kampung Laut*, makalah disampaikan pada Jambore Nasional Forum Warga di Makassar tahun 2008.

<sup>8</sup> George Ritzer, *Sociologi, A Multiple Paradigm Science*, (London: Allyn and Bacon Inc, 1980), hlm. 53.

<sup>9</sup> SP. Turner, *The Cambridge Companion to Weber*, (New York: Cambridge University, 2000), hlm. 15.

<sup>10</sup> SP. Turner, *The Cambridge Companion to Weber*, (New York: Cambridge University, 2000), hlm. 75.

<sup>11</sup> Doyle Paul Johnson, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, Alih Bahasa MZ. Lawang, (Jakarta: Gramedia, 1988), hlm. 113.

<sup>12</sup> Relasi-kuasa berpengaruh terhadap konstruksi sosiologis suatu masyarakat. Hal ini karena relasi kuasa melahirkan hubungan yang tidak seimbang antara kelompok dominan dan terdominasi. Kelompok dominan memaksakan segala sesuatu yang dimilikinya untuk dilakukan oleh kelompok terdominasi, termasuk penilaian tentang baik atau buruk. Kelompok terdominasi dipaksa untuk melakukan sesuatu yang menurut kelompok dominan sebagai baik. Kondisi ini yang dalam istilah Bourdieu sebagai kekerasan simbolik, yaitu penaklukan ideologis kelompok-kelompok sosial. Pierre Bourdieu, *In Other Words, Essays Towards a reflexive Sociology*, (Cambridge: Polity Press, 1990), hlm. 122-124.

<sup>13</sup> Pemikiran filsafat modern tentang masyarakat terbelah menjadi 2 (dua) yaitu terciptanya kehidupan masyarakat berdasarkan hasil persetujuan dan konsensus umum. Aliran lain berpendirian bahwa ikatan dan tata kehidupan masyarakat didasarkan atas kekuasaan dan paksaan golongan tertentu dan penundukan terhadap golongan lain. Terminologi marginalisasi didasarkan atas aliran pemikiran sosial yang kedua bahwa ia merupakan praktik sosial – politik yang menekankan adanya dominasi kekuasaan. Ralf Dahrendorf, *Konflik dan Konflik dalam Masyarakat Industri*, (Jakarta: Rajawali Press, 1986), hlm. 191-194.

<sup>14</sup> Menurut cerita rakyat yang sampai sekarang masih dipercaya kebenarannya oleh masyarakat setempat. Penduduk asli Kampung Laut adalah anak keturunan dari para prajurit Mataram. Para prajurit Mataram pada waktu itu datang ke daerah Kampung Laut untuk mengamankan daerah perairan Segara Anakan dari gangguan bajak laut orang Portugis. Para prajurit itu dipimpin oleh empat orang wiratamtama, yaitu Jaga Playa, Jaga Praya, Jaga Resmi dan Jaga Laut. Berkat kesaktian dari para wiratamtama itu maka perairan Cilacap dan Segara Anakan akhirnya aman, bebas dari gangguan bajak laut. Setelah keadaan aman, ternyata para wiratamtama dan anak buahnya itu tidak mau kembali ke pusat kerajaan Mataram, melainkan tetap tinggal di kawasan Cilacap dan sekitarnya. Jaga Playa dan Jaga Praya bermukim di daerah yang sekarang disebut Klapalima, sementara itu Jaga Resmi dan Jaga Laut memilih tinggal di Pulau Nusakambangan. Jaga Resmi bermukim di daerah yang kini disebut Legok Pari, sedangkan Jaga Laut bertempat tinggal di Gebang Kuning atau yang sekarang lebih dikenal dengan nama Kembang Kuning.

## DAFTAR PUSTAKA

Abdul Rahman, Agus. 2013. *Psikologi Sosial, Integrasi Pengetahuan Wahyu dan Pengetahuan Empirik*. Jakarta: Raja Grafindo.

- 
- Abdullah, Amin 2004. *Studi Agama, Normativitas atau Historisitas?*, Cet – IV, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ahmadi, Abu. 1991. *Psikologi Sosial*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ardianto, Elvinaro dan Bambang Q-Anees. 2007. *Filsafat Ilmu Komunikasi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Bourdieu, Pierre. 1990. *In Other Words, Essays Towards a Reflexive Sociology*, Cambridge: Polity Press.
- Eriyanto. 2009. *Analisis Wacana, Pengantar Analisis Teks Media*. Yogyakarta: LkiS.
- F. O’Dea, Thomas. 1996. *Sosiologi Agama, Suatu Pengenalan Awal*. Jakarta: Rajawali Press.
- H. Turner, Jonathan dan Alexandra Maryanski. 2010. *Fungsionalisme*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ian Craib. 1994. *Teori-Teori Sosial Modern, dari Parsons sampai Habermas*. Jakarta: Raja Grafindo.
- J. Miflen, Frank dan Sydney C. Miflen. 1986. *Sosiologi Pendidikan*. Bandung: Transito.
- Kusnadi. 2002. *Konflik Sosial Nelayan, Kemiskinan dan Perebutan Sumberdaya Perikanan*, Yogyakarta: LkiS.
- L Berger, Peter dan Thomas Luckman. 1990. *Tafsir Sosial atas Kenyataan, Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan*. Jakarta: LP3ES.
- L. Pals, Daniel. 1996. *Seven Theories of Religion*. New York: Oxford University Press, David Lee dan Howard Newby, *The Problem of Sociology*. London: Hutchinson & Co. Publisher Ltd.
- Muttaqin, Ahmad. 2008. *Alih Profesi Masyarakat Kampung Laut*, makalah disampaikan pada Jambore Nasional Forum Warga di Makassar.
- Nugroho, Heru. 2001. *Menumbuhkan Ide-Ide Kritis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Paul Johnson, Doyle. 1998. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*. Alih Bahasa MZ. Lawang, Jakarta: Gramedia.
- Pusat Studi Asia Pasifik (PSAP) UGM Yogyakarta, *Keanekaragaman Hayati Segara Anakan*, Laporan Penelitian tahun 2001-2001.
- R. Scharf, Betty. 2004. *Sosiologi Agama*. Jakarta: Prenada Media.
- Ritzer, George. 1980. *Sociology, A Multiple Paradigm Science*. London: Allyn and Bacon Inc.
- Soekanto, Soerjono. 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo.
- SJ Taylor dan R Bogdan. 1984. *Introduction to Qualitative Research Methods, The Search Meanings*, Second Edition. Toronto: John Miley and Sons.
- SP. Turner. 2000. *The Cambridge Companion to Weber*, New York: Cambridge University.
- Stryker, Sheldon. 1980. *Symbolic Interactionism, A Structural Version*. California: Benjamin Cummings.